

LAPORAN BULANAN PPID ITJEN

BULAN JULI 2022

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai UU 14 Tahun 2008, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu pemerintah mengakui bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dalam ruang lingkup Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian;
4. SK Pengelola dan Pelayanan Informasi lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian nomor : B-021/Kpts/OT.050/G/1/2022 tanggal 08 Januari 2021

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan bulanan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dimaksudkan untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang dilaporkan melalui portal PPID dan Website Inspektorat Jenderal meliputi dua aspek, yaitu jenis informasi, dan saluran Informasi. Berikut penjelasan atas kedua hal tersebut:

1. Jenis informasi

o Terbuka

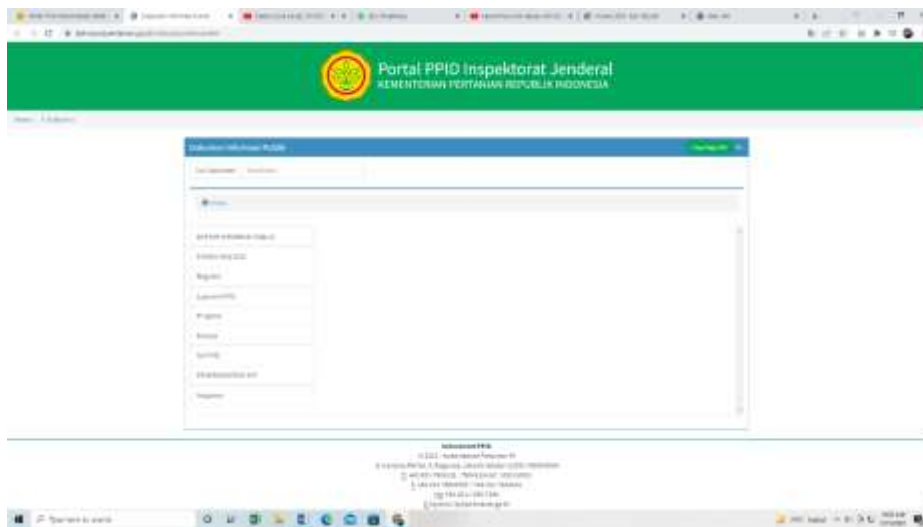
▪ Setiap Saat

Informasi yang masuk dalam katagori setiap saat sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62 Tahun 2011 adalah profil unit kerja, yang terdiri dari Visi, Misi, Struktur

Organisasi, Dasar Hukum, Sejarah, Tugas dan Fungsi, dan Profil Pejabat (nama, jabatan, alamat dan nomor telp unit kerja, email resmi pertanian, penghargaan yang telah diterima dan LHKPN yang telah diverifikasi KPK).

- Berkala

Informasi yang masuk dalam katagori informasi berkala meliputi Renstra, DIPA, RKAKL, LRA, Laporan Keuangan, Laporan SIMAK BMN, RKT, Laporan PPID, LAKIN, Laporan Tahunan, Laporan Pengaduan, LHKPN, LHKASN, Regulasi, Publikasi (Media Auditor)



- Serta Merta

Informasi yang termasuk dalam katagori serta merta adalah penyampaian suatu kejadian yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain Laporan Penanganan COVID-19 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

2. Saluran Informasi

Dalam rangka pelayanan informasi, saluran informasi yang digunakan adalah sebagaimana table berikut:

No.	Saluran	Alamat
1	Portal PPID	https://itjen-ppid.pertanian.go.id/
2	Website	https://itjen.pertanian.go.id/
3	Media Sosial	
3.a.	- FB	https://www.facebook.com/itjenkementan
3.b.	- IG	https://www.instagram.com/itjenkementan/
3.c.	- Twitter	https://twitter.com/ItjenKementan
3.d.	- Youtube	itjenkementan
4	LAPOR!	https://www.lapor.go.id/
5	WBS	https://www.pertanian.go.id/wbs/
6	Sigap Protani	https://sigap-upg.pertanian.go.id/

BAB II

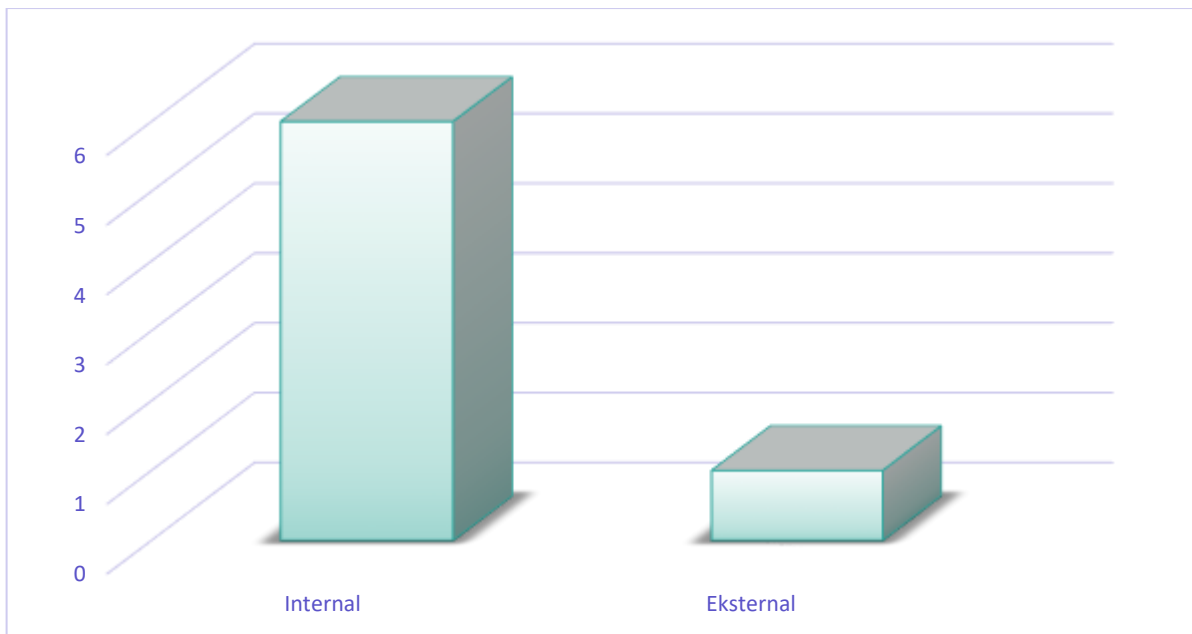
KINERJA LAYANAN INFORMASI PPID INSPEKTORAT JENDERAL

PPID Itjen selama bulan Mei 2022 telah Melakukan kinerja Pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan langsung dan tidak langsung antara lain :

A. Permohonan Informasi Datang Langsung

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik dengan datang langsung sebagai berikut :

- Pemohon informasi internal lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama bulan Juli 2022 sebanyak 6 pemohon informasi untuk 17 dokumen
- Pemohon informasi eksternal sebanyak 1 pemohon atas 7 dokumen

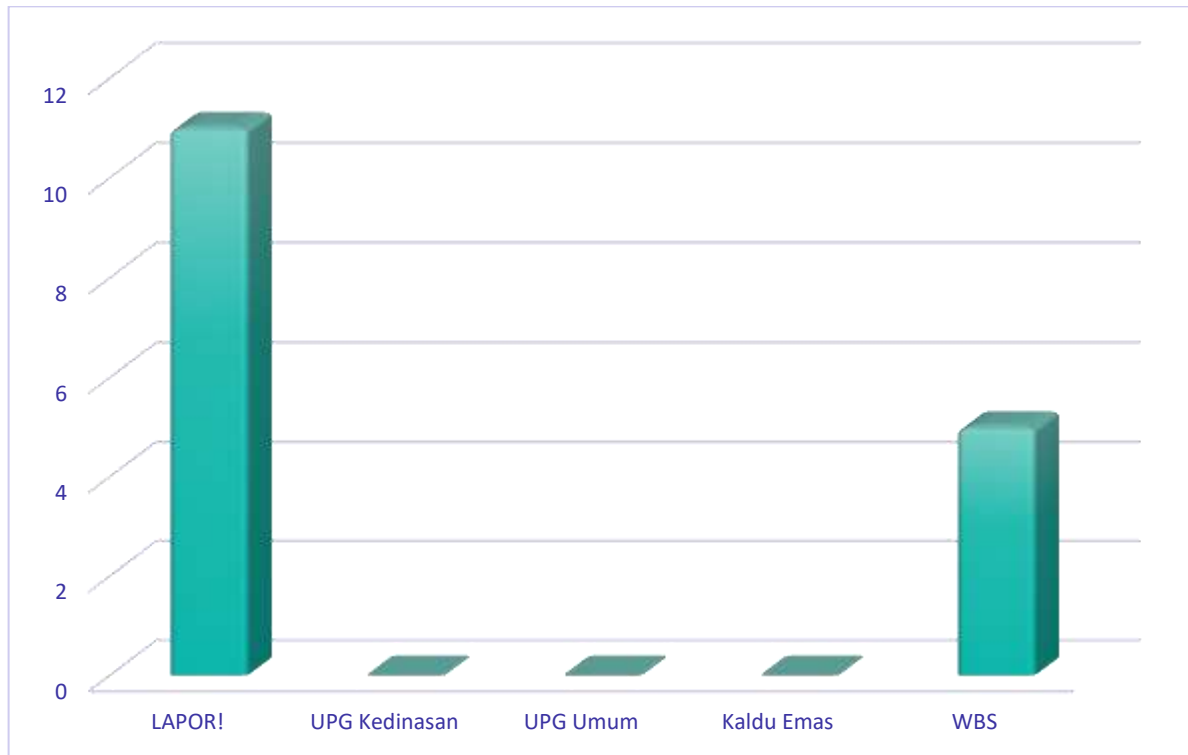


B. Permohonan Tidak Langsung melalui aplikasi

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik melalui aplikasi antara lain :

- Pengaduan melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 11 pelaporan
- Pengaduan melalui aplikasi Sigap UPG tidak dapat akses dikarenakan jaringan Kementerian Pertanian sedang dalam perbaikan
- Pengaduan melalui aplikasi WBS (*Whistle Blowing System*) sebanyak 5 laporan

- Pengaduan melalui Kaldu Emas tidak dapat akses dikarenakan jaringan Kementerian Pertanian sedang dalam perbaikan.



BAB III

KESIMPULAN & PENUTUP

PPID Pelaksanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama masa pandemi tetap melaksanakan tugas layanan informasi. Pemohon informasi sebagian besar berasal dari internal dan eksternal (datang langsung) kecuali yang diterima melalui kanal pengaduan

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Jakarta, 03 Juli 2022

Mengetahui
Sekretaris Itjen
Selaku Atasan PPID Itjen



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si.

Koordinator Organisasi
Kepegawaian Hukum dan
Hubungan Masyarakat
Selaku PPID Itjen



Edi Puspito, SE, M.Si

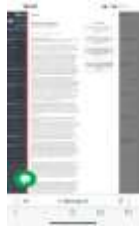





PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP PPID INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
Bulan Juli 2022

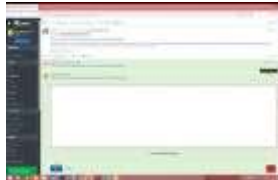




NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL	JABATAN	INSTANSI	DOKUMEN INFORMASI	TINDAKLANJUT	BENTUK
PERMOHONAN INFORMASI INTERNAL							
1.	Firman Ardiansyah	11/07/2022	Pejabat Pengadaan	Sekretariat	1. SK KPA TTG PENUNJUAN PEJABAT PBJ	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
2.	Firman Ardiansyah	13/07/2022	Pejabat Pengadaan	Sekretariat	2. SK KPA ttg Tim Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah TA.2022	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
3.	Feri Yoga	29 Juli 2022	Auditor Muda	Inspektorat II	3. Rakapitulasi Pemberitaan Kunjungan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
4.	Memet Darmawan	30 Juli 2022	Auditor Madya	Inspektorat II	4. Rakapitulasi Pemberitaan Kunjungan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
5.	Dina Isnaini	30 Juli 2022	Perencana	Sekretariat	5. STP Audit Tujuan Tertentu	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					6. STP Audit Investigasi	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					7. Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementan	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					8. STP Audit Kinerja	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					9. Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					10. Pedoman Teknis Pelaksanaan Reviu RKA-KL Kementan	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
6.	Linda Dewi PS	Auditor Muda	Auditor Muda	Inspektorat II	11. STP Audit Investigasi	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	
					12. Pedoman Teknis Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Lingkup Kementan	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	
					13. STP Audit Kinerja	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	
					14. Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	
					15. Pedoman Teknis Manajemen Risiko SPBE Kementan	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					16. STP Penugasan Pengawasan	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy
					17. Rakapitulasi Pemberitaan Kunjungan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan dokumentasi	Soft Copy

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP PPID INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
Bulan Juli 2022

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAL	JABATAN	INSTANSI	DOKUMEN INFORMASI	TINDAKLANJUT	BENTUK
PERMOHONAN INFORMASI INTERNAL							
7	Vivi	26 Juli 2022	Pranata Humas	BKP Entikong	15. Dokumentasi Irjen	Dokumen permohonan telah dipenuhi oleh pengelola informasi dan	Soft Copy

**Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Melalui LAPOR!
Periode Juli 2022**

NO	MATERI PENGADUAN	TANGGAL DISPOSISI KSP	BATAS WAKTU TL	PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL DISPOSISI ITJEN	TANGGAL JAWAB	STATUS	KETERANGAN
1	Buffer Stock Jagung 	3 Juli 2021	14 Juli 2022	Ditjen PKH	5 Juli 2022			
2	Permohonan Solusi Permasalahan Porang 	3 Juli 2022	3-Sep-22	Ditjen PSP				
3	Tolak Pengajuan Eselon 1 Baru Di Kementerian Pertanian 	5 Juli 2022	5-Sep-22	Setjen	11 Juli 2022	18 Juli 2022		<p>Sehubungan dengan pengaduan Saudara, maka kami sampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Lampiran I yang disampaikan Pelapor terkait surat Menteri PANRB nomor B/639/M.SM.02.00/2021 tanggal 3 November 2021 perihal Moratorium Pengusulan Jabatan Fungsional Baru, menjelaskan bahwa penghentian sementara terhadap pengusulan Jabatan Fungsional baru terhitung sejak surat tersebut diterbitkan hingga selesainya perancangan. Sampai saat ini, Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pembina 16 (enam belas) jenis Jabatan Fungsional bidang Pertanian tidak melakukan pengusulan Jabatan Fungsional.</p> <p>2. Lampiran II yang disampaikan Pelapor terkait surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian nomor B-3726/KP.240/A2/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional. Uji kompetensi dilaksanakan untuk memfasilitasi perpindahan Jabatan Fungsional Peneliti, Perekrayasa, dan Teknisi Litkayasa ke Jabatan Fungsional bidang Pertanian sebagai langkah tindak lanjut terhadap surat edaran Menteri PANRB Nomor B/601/M.SM.02.03/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Pengalihan PNS yang Meaksanakan Fungsi Litbangjirap dalam Jabatan Fungsional Peneliti, Perekrayasa, dan Teknisi Litkayasa pada Kementerian/Lembaga ke BRIN.</p> <p>3. Berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas, disampaikan bahwa: a. Tidak ada korelasi antara Lampiran I dan Lampiran II, karena mengatur ketentuan yang berbeda. b. Pelaksanaan uji kompetensi pada surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian nomor B-3726/KP.240/A2/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 35 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.</p>
4	Tolak Eselon 1 Baru Kementerian Pertanian 	12 Juli 2022	12-Sep-22	Setjen	18 Juli 2022	20 Juli 2022	Selesai	SDA
5	Asn Kementan Tidak Netral 	5 Juli 2022	5-Sep-22	Setjen	9 Juli 2022	20 Juli 2022		<p>sehubungan dengan aduan saudara maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPT Madya telah kami tindaklanjuti dengan membentuk Tim Pengawas Internal ASN Kementerian Pertanian dan telah melakukan pemeriksaan kepada para PPT Madya; 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kementerian Pertanian telah menjatuhkan sanksi hukuman disiplin kepada PPT Madya yang bersangkutan dan telah disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPT Madya yang bersangkutan telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih</p>
6	Belum Adanya Tindak Lanjut Sanksi Buat Asn Kementan Yang Hadir Pada Acara Partai Nasdem Dan Menggunakan Seragam Porsis Partai Nasdem 	13 Juli 2022	13-Sep-22	Setjen	18 Juli 2022	20 Juli 2022		SDA

NO	MATERI PENGADUAN	TANGGAL DISPOSISI KSP	BATAS WAKTU TL	PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL DISPOSISI ITJEN	TANGGAL JAWAB	STATUS	KETERANGAN
7	Selalu Gagal Registrasi Akun Silayan 	25 Juli 2022	8 Agustus 2022	Setjen	26 Juli 2022			
8	Regulasi Pakan Hewan Ternak 	26 Juli 2022	31 Juli 2022	Ditjen PKH	26 Juli 2022		28 Juli 2022	Baik, menanggapi pertanyaan Saudara. Kami sampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, salah satu persyaratan produk pakan dapat beredar adalah memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Untuk mendapatkan NPP tersebut, produsen pakan harus melakukan pengujian mutu dan keamanan pakan di laboratorium pakan pemerintah yang telah terakreditasi. Hasil pengujian mutu dan keamanan pakan akan disandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) Pakan. Jika hasil uji sudah sesuai dengan SNI dan PTM maka akan diterbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagai persyaratan mendapatkan NPP. Untuk menjamin proses produksi pakan, pemerintah menerbitkan Kepmenpan Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB). Terhadap penerapannya dilakukan penilaian CPPB kepada produsen pakan yang mencakup unsur 1) Lokasi; 2) Bangunan; 3) Personalia; 4) Higiene dan Sanitasi; 5) Bahan Pakan; 6) Produksi; 7) Pengawasan mutu pakan; 8) Inspeksi Internal; dan 9) Penanganan terhadap Hasil Keluhan Pelanggan dan Penarikan Kembali Pakan yang Beredar. Dalam menjaga mutu dan keamanan pakan yang beredar, Pemerintah secara reguler melakukan pengawasan mutu dan keamanan pakan melalui pengambilan sampel dan pengujian pakan. Jika ditemukan pakan yang tidak sesuai standar baik mutu dan keamanan maka akan diberikan sanksi kepada produsen pakan tersebut. Demikian kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
9	Indikasi Kolusi Dalam Pelatihan Edible Coating Untuk Produk Holtikultura Yang Diadakan Oleh Kontak Bisnis Holtikultura (Kbhi) 	26 Juli 2022	26-Sep-22	Ditjen Horti	26 Juli 2022		2 Agustus 2022	Kronologi keluhan masyarakat mengenai indikasi kolusi pelatihan edible coating yang diadakan BRIN bekerja sama dengan Kontak Bisnis Hortikultura (KBHI). Informasi : Berdasarkan informasi dari Ketua KBHI Saudara Kurniadi Ikhwani bahwasanya penyelenggara kegiatan yang berlangsung pada Mei, Juni dan Juli ini adalah BRIN. Bekerja sama dengan KBHI dalam hal mencari lokasi acara dan peserta Peserta yang diperlukan dalam acara ini harus memenuhi kriteria antara lain: 1. Eksportir buah ; 2. Memiliki lahan; 3. Pengepul. Kurniadi Ikhwani menyebutkan bahwa memang diberikan transport kepada peserta. Meskipun demikian BRIN hanya membatasi peserta tiap gelombang yakni, 30 orang. Seleksi peserta menjadi wewenang penuh BRIN selaku panitia acara. Peserta yang tidak lolos seleksi sudah diberi pesan melalui WA agar dapat mengikuti pelatihan via online pada 10 Agustus 2022. Fasilitas yang diberikan panitia selain materi dari narasumber, juga termasuk e-sertifikat. Kegiatan ini tidak melibatkan Kementerian Pertanian selaku pembina KBHI. Acara ini merupakan acara dari pihak BRIN yang mengikutsertakan KBHI sebagai referensi.
10	Permintaan Informasi Permasalahan Pertanian Di Indonesia 	25 Juli 2022	30 Juli 2022	Admin		26 Juli 2022		Yth Saudara Pelapor Terima kasih atas permohonan informasi yang disampaikan. Dapat kami sampaikan bahwa permohonan informasi yang Saudara ajukan agar disampaikan melalui Portal PPID Kementerian Pertanian pada alamat sebagai berikut : https://ppid.pertanian.go.id/ Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
11	Indikasi Kolusi Dalam Pelatihan Edible Coating Untuk Produk Holtikultura Yang Diadakan Oleh Kontak Bisnis Holtikultura (Kbhi) 							

**Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat melalui kanal WBS dan UPG
Periode Juli 2022**

NO	MATERI PENGADUAN	ESELON I	KEJ	JUMLAH	KETERANGAN
1	UPG Kedinasan		0	0	Sedang Maintance Pusdatin
2	UPG Umum		0	0	Sedang Maintance Pusdatin
3	Kaldu Emas	-	0	0	Sedang Maintance Pusdatin
4	WBS		5	5	